



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT serta Shalawat dan Salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 telah diselesaikan sesuai dengan sisematika penyusunan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 merupakan penjabaran secara berkesinambungan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022. Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 sampai dengan tahap ini telah melalui beberapa proses penyesuaian, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan perencanaan kinerja Sekretariat DPR Aceh yang efektif dan efisien.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

SUHAIMI, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640622 199403 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPR ACEH	
TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPR Aceh	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPR Aceh	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh ...	8
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPR ACEH.....	13
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Aceh	15
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPR ACEH....	19
BAB IV PENUTUP	20
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

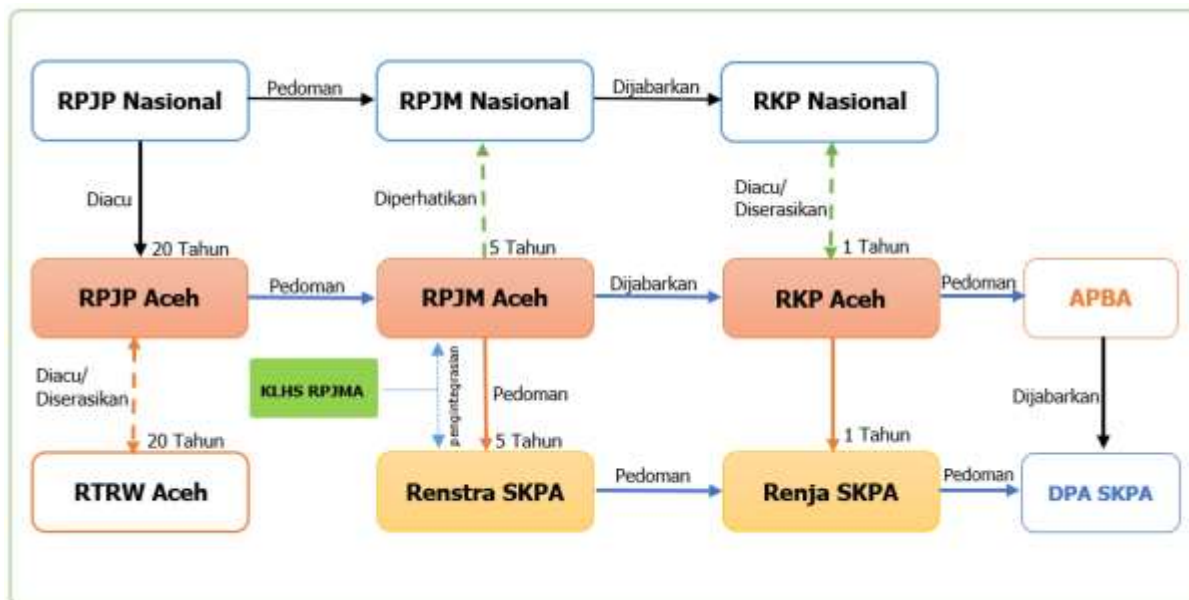
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun paling lambat minggu pertama bulan Desember.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja yang berpedoman pada Renstra dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tersebut bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju serta memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja perangkat daerah dengan Renstra perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen



Sumber: Rancangan Awal RPJMA Tahun 2017-2022

Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK), merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi secara operasional memberi pelayanan terhadap DPR Aceh dalam menjalankan fungsi sesuai peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR Aceh pembentukan peraturan daerah (Qanun), anggaran dan pengawasan, sehingga Sekretariat DPR Aceh harus menyusun Rancangan Awal Renja Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang menjabarkan tentang tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh selama tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) Sekretariat DPR Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 disusun dengan maksud:

- a. Menjadi pedoman bagi Sekretariat DPR Aceh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam KUA dan PPA Tahun 2020;
- b. Untuk menyediakan salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 adalah :



- a. Sebagai penjabaran perencanaan Tahun 2020 dari Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022.
- b. Sebagai pedoman untuk memahami tujuan dan sasaran Sekretariat DPR Aceh, sesuai Renstra Sekretariat DPR Aceh Tahun 2017-2022 dan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPR ACEH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPR Aceh

Pada subbab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh tahun lalu (2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019) yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat DPR Aceh dalam melaksanakan pogram dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja pogram dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sekretariat DPR Aceh tahun 2018 melaksanakan 6 (enam) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan yang spesifik dari Sekretariat DPR Aceh terinci sebagai berikut:

1. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, terdiri dari kegiatan yaitu:
 - a. Pembangunan gedung kantor dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%;
 - b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.
 2. **Program peningkatan disiplin aparatur**, dengan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.
 3. **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**, dengan kagiatan pendidikan dan pelatihan formal dan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.
 4. **Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian realisasi kinerja sebesar 71%;
 - b. Rapat-rapat paripurna dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%;
 - c. Kegiatan reses dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%;
-



- d. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%;
 - e. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%;
 - f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%.
5. **Program peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan** dengan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan dan capaian realisasi kinerja sebesar 22%.

Realisasi program/kegiatan tersebut diatas pada umumnya telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan serta tidak adanya program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Namun pada program peningkatan pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dengan kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan capaian realisasi kinerja rendah sebesar 22%, hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran Pimpinan/Anggota DPR Aceh akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.

Capaian realisasi tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap target capaian program yang masih sangat rendah, sehingga diperlukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja tersebut, yaitu salah satunya memberikan himbauan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dalam mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, salah satunya kegiatan penyediaan jasa medical check up bagi Anggota DPR Aceh sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPR Aceh tahun 2018 dan realisasi Renstra Sekretariat DPR Aceh yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 terlampir pada Tabel T-C.29.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPR Aceh

Analisis kinerja pelayanan merupakan capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPR Aceh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh Aceh dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 yaitu memberikan pelayanan terhadap DPR Aceh dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Aceh, sehingga sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut maka Sekretariat DPR Aceh menetapkan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja utama yang terinci sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelaksanaan fungsi DPR Aceh	Persentase fasilitasi penetapan Qanun	Perbandingan antara jumlah qanun yang ditetapkan dengan jumlah Rancangan qanun prolega	Untuk memenuhi fungsi Sekretariat DPR Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016	Bagian Hukum dan Humas
		Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPR Aceh	Perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan peningkatan kapasitas DPR Aceh dengan jumlah kegiatan perencanaan peningkatan kapasitas DPR Aceh		Bagian Persidangan dan Risalah; Bagian Umum
		Persentase fasilitasi Masa Persidangan yang terselenggara	Perbandingan antara realisasi Masa Persidangan yang terselenggara dengan jumlah perencanaan masa persidangan dalam RKT DPR Aceh		Bagian Persidangan dan Risalah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel T-C.30 *terlampir*.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR Aceh

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPR Aceh memberikan pelayanan terhadap DPR Aceh dengan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh, serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Aceh.

Fungsi Sekretariat DPR Aceh dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, adalah:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPR Aceh;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPR Aceh;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPR Aceh;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPR Aceh; dan
- e. pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPR Aceh, khususnya dalam kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPR Aceh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPR Aceh tentu adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi, antara lain:

1. Tuntutan standar kinerja DPR Aceh yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPR Aceh serta pemanfaatan anggaran dan tenaga ahli yang tersedia;
2. Kompetensi Aparatur Sekretariat DPR Aceh relatif belum sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPR Aceh relatif belum maksimal untuk mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan.

Dari identifikasi permasalahan tersebut tentunya akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, yaitu: Visi: **“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”** Misi: **“Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki”**. Program Sekretariat DPR Aceh yang mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut adalah peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, sehingga dengan permasalahan yang dihadapi tentunya akan berimplikasi terhadap pelaksanaan program dimaksud. Dimana



Sekretariat DPR Aceh dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Aceh baik secara teknis maupun administratif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN, amanah dan bersih melalui reformasi birokrasi dan penyelesaian peraturan pelaksanaan UUPA, penguatan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

Tantangan dan peluang Sekretariat DPR Aceh dalam meningkatkan pelayanan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Lingkungan strategis dimaksud berupa lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*). Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di lingkungan eksternal Sekretariat DPR Aceh sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya anggaran operasional kerja yang cukup memadai;
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPR Aceh berdasarkan Peraturan DPR Aceh yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh;
- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat Dewan dengan DPR Aceh.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh;
- b. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPR Aceh yang belum optimal sesuai dengan kebutuhan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

3. Peluang

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan Anggota DPR Aceh;
 - b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
 - c. Besarnya volume kegiatan DPR Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat;
-



- d. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- e. Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPR Aceh; dan
- f. Banyaknya penawaran diklat fungsional dan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.

4. Ancaman/Tantangan

- a. Adanya persepsi yang berbeda dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPR Aceh;
- b. Terjadinya pergantian antar waktu Anggota DPR Aceh dari partai lokal/partai nasional;
- c. Masih ditemui hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi secara menyeluruh di Sekretariat DPR Aceh;
- d. Belum terpenuhinya aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
- e. Peran managerial dalam mengorganisir SDM belum secara merata; dan
- f. Kemampuan aparatur dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai.

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya isu strategis atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, maka yang menjadi isu- isu strategis Sekretariat DPR Aceh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Peningkatan kompetensi Aparatur Sekretariat DPR Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPR Aceh untuk mendukung tugas dan fungsi DPR Aceh sebagai lembaga perwakilan;
 3. Pemenuhan tuntutan standar kinerja DPR Aceh melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPR Aceh, pemanfaatan anggaran yang tersedia dan tenaga ahli.
-



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Review rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 yang ada dalam rancangan awal Renja ini menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang terdapat pada RPJMA dan Renstra Sekretariat DPR Aceh Periode 2017-2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPA terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya SKPA.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Provinsi Aceh

Sekretariat DPR Aceh

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
	N I H I L				

Berdasarkan pada tabel T-C. 32 dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPR Aceh merupakan unsur pelayanan langsung terhadap Anggota DPR Aceh dalam menjalankan fungsinya yaitu pembentukan peraturan daerah (Qanun), anggaran dan pengawasan. Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya saja Sekretariat DPR Aceh memfasilitasi kegiatan Reses DPR Aceh



sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPR Aceh bahwa Anggota DPR Aceh mempergunakan waktu Reses tersebut untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi rakyat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Hasil kegiatan reses masing-masing anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPR Aceh selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah reses. Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPR Aceh dapat menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti dan dianggarkan pada SKPA terkait.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPR ACEH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional mencermati prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun yang direncanakan terkait dengan pembangunan daerah provinsi. Prioritas dan sasaran pembangunan Aceh yang mengacu pada visi misi kepala daerah periode 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yaitu:

Visi “ Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”.

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut :

- (1) **Aceh yang damai** bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memantapkan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;
- (2) **Aceh yang sejahtera** bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;
- (3) **Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani** bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) misi sebagai berikut :

- a. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
 - b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
 - c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
 - d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional;
-



- e. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi;
- f. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
- g. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
- h. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
- i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
- j. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah aceh, untuk pencapaian visi dan misi pembangunan selama periode tahun 2017-2022, juga didukung oleh 15 unggulan Aceh Hebat yaitu :

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)
 2. Acèh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
 3. Aceh Caròng
 4. Acèh Energi
 5. Aceh Meugoë dan Meulaôt
 6. Acèh Troë
 7. Acèh Kreatif
 8. Acèh Kaya
 9. Acèh Peumulia
 10. Acèh Damê
 11. Acèh Meudadab
 12. Acèh Teuga
 13. Acèh Green
 14. Acèh Seuninya
 15. Acèh Seumeugot
-



Dari hasil telaahan Visi Dan Misi, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan 15 Unggulan Aceh Hebat, maka Prioritas pembangunan RPJMA tahun 2017-2022 terdiri dari:

1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam
2. Akses dan Kualitas Kesehatan
3. Infrastruktur Terintegrasi
4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan
5. Nilai Tambah Sektor Strategis
6. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Investasi dan Kemandirian Energi
8. Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan
9. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan RPJMA Tahun 2017-2022, layanan bidang urusan Sekretariat DPR Aceh meliputi tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPR Aceh, tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPR Aceh untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda (Qanun), dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMA) maupun dokumen rencana tahunan (RKPA) dan terintegrasinya program-program DPR Aceh untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda (Qanun) dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPR Aceh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPR Aceh

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPR Aceh didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPR Aceh.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka Renja Sekretariat DPR Aceh merupakan gambaran tentang keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sehingga tujuan dan sasaran Renja dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses



penyusunan perencanaan dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya yang secara efisien dan efektif, serta dukungan sarana prasarana dan pengembangan aparatur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan Sekretariat DPR Aceh sangat mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPR Aceh, sehingga kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dapat meningkat.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPR Aceh dalam memberikan pelayanan kepada DPR Aceh, maka sesuai dengan RPJMA Tahun 2017-2022 Sekretariat DPR Aceh merupakan salah satu pelaksana untuk mewujudkan Misi yang ketiga yaitu “**Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki**” dengan tujuan “**Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki**”, dan Sasaran “**Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA**”, serta masuk dalam kategori Unggulan Aceh Hebat yang ke-10 yaitu **Aceh Damê**. Dengan terlaksananya misi tersebut di atas, maka diharapkan penguatan pelaksanaan UU-PA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif dapat terwujud.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPR Aceh yang ditetapkan dalam RPJMA Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip MoU Helsinki	- Tuntasnya Aturan Turunan UU-PA	- Persentase Qanun yang diselesaikan

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah didukung oleh program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.



Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh mengacu kepada prioritas dan sasaran pembangunan Aceh pada RPJMA yaitu penguatan perdamaian secara berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah yang ingin diwujudkan dalam tahun 2017-2022 dapat terwujud.

Sesuai dengan Qanun RPJMA Tahun 2017-2022, Sekretariat DPR Aceh mendapat penambahan 1 program baru yaitu **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dan penambahan 2 kegiatan baru yaitu kegiatan **Pengembangan SDM Aparatur** dan **Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan** (hasil rapat Musrenbang Renja Tahun 2020). Sejalan dengan perwujudan prioritas dan sasaran pembangunan Aceh tersebut maka rekapitulasi program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, dengan sebaran/lokasi program dan kegiatan tersebut pada lingkup Sekretariat DPR Aceh yang terdiri dari kegiatan pada kantor Sekretariat DPR Aceh, Rumah Jabatan Ketua DPR Aceh dan Rumah dinas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh. Adapun rincian program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 1.6 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 1.11 Penyediaan Jasa Dokumentasi kantor
 - 1.12 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1 Pembangunan Gedung Kantor
-



- 2.2 Pengadaan Mobil Jabatan
 - 2.3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 2.4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - 2.5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - 2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 2.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - 2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
 - 2.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - 2.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - 4.2 Pengembangan SDM Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 5.1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja
 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 6.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 6.2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
 - 6.3 Rapat-rapat Paripurna
 - 6.4 Kegiatan Reses
 - 6.5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh Dalam Daerah
 - 6.6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh
 - 6.7 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 7. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPR Aceh
 - 7.1 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan.
-



Dari 7 program tersebut di atas, terdapat 2 Program prioritas Sekretariat DPR Aceh yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Aceh dan sesuai dengan RPJMA Tahun 2017-2022 yaitu **“Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah”** dengan indikator persentase Qanun yang ditetapkan dan **“Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA”** dengan indikator Persentase Anggota DPR Aceh yang dapat menjalankan fungsinya.

Adapun rincian program dan kegiatan serta rencana pendanaan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 dan perkiraan maju Tahun 2021 dengan satuan lima dapat dilihat pada Tabel T-C.33 *terlampir*.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPR ACEH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 disusun sebagai pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Jumlah total pagu indikatif Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 sesuai dengan Tabel 7.2 RPJMA Tahun 2017-2022 adalah sebesar **Rp.133.696.026.237,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 54.043.346.064 ,-** dan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 79.652.680.173,-**. Selanjutnya terjadi penyesuaian (pengurangan dan penambahan) anggaran, sehingga total pagu anggaran menjadi **Rp.136.196.025.953,-** dengan jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 54.043.346.064 ,-** dan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp.82.152.679.889,-**. Rincian anggaran sesuai program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.4 (terlampir).



BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan. Untuk mendukung kinerja Sekretariat DPR Aceh, sesuai hasil rapat Musrenbang Renja Tahun 2020 Sekretariat DPR Aceh diarahkan untuk menambah 2 (dua) kegiatan baru sehingga jumlah program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran semula sesuai RPJMA sebesar Rp. 79.652.680.173,-. Anggaran ini selanjutnya terjadi penyesuaian kembali (adanya pengurangan dan penambahan) menjadi Rp. 82.152.679.889,- dan telah berhasil diinputkan kedalam sistem *e-budgeting*.

Diharapkan dengan selesainya Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 dapat dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, sehingga target kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPR Aceh Tahun 2020 dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

SUHAIMI, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640622 199403 1 001



TABEL T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2019
PROVINSI ACEH

NAMA SKPA : SEKRETARIAT DPR ACEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra SKPA) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan (Tahun n-3) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPA Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun (n-1) Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d Tahun Berjalan (Tahun 2019)	
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)	11=(10/9)
1	Urusan Wajib									
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-
1 20 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor dalam menunjang kelancaran tugas perkantoran	-	100 %	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	-	-	-
1 20 02 04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Pimpinan DPRA yang tersedia	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1 20 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Opr	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang tersedia dalam operasional kantor	-	6 Unit	-	-	-	4 Unit	-	-
1 20 02 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Tersedianya kelengkapan rumah jabatan/dinas dalam mendukung kegiatan perkantoran	100 %	100 %	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	-	-
1 20 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya kelengkapan gedung kantor dalam menunjang kegiatan perkantoran	100 %	100 %	-	-	-	31 Kegiatan	-	-
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kedisiplinan aparatur dalam kehadiran, identitas dan atribut								
1 20 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA serta PNS Sekretariat DPR Aceh	81 Orang	100 %	507 Orang	507 Orang	100%	81 Orang	-	-
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi								
1 20 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS Sekretariat DPRA yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	23 Orang	100 %	6 Orang	6 Orang	100%	5 Orang	-	-
1 20 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Qanun yang ditetapkan								
1 20 15 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Aceh yang dibahas	15 Qanun	80%	17 Qanun	12 Qanun	71%	12 Qanun	-	-
1 20 15 04	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat dalam masa Persidangan yang terselenggara	17 Kali	17 Kali	4 Masa Persidangan	4 Masa Persidangan	100%	4 Masa Persidangan	-	-
1 20 15 05	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRA yang terselenggara	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	-	-
1 20 15 06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100 %	81 Orang	81 Orang	100%	81 Orang	-	-
1 20 15 07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRA	100%	100 %	81 Orang	81 Orang	100%	81 Orang	-	-
1 20 15 08	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah (Qanun) yang dilaksanakan	100%	100 %	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	-	-
1 20 56	Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	Persentase Anggota DPRA yang dapat menjalankan fungsinya								
1 20 56 01	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Tersedianya General Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRA beserta keluarga	81 Orang	81 Orang	81 Orang	18 Orang	22%	81 Orang	-	-

Banda Aceh, 26 Juli 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SUHAIMI, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
19640622 199403 1 001



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.00.02.01.	Sekretariat DPRA				136,196,025,953.00			140,935,975,996.00	
5.1.	Belanja Tidak Langsung		Banda Aceh	100%	54,043,346,064		100%	56,957,504,167.00	
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan				26,773,466,064			28,324,130,167	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS (PAA)				9,044,880,000			9,497,124,000	
5.1.1.03.	Belanja penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH				18,225,000,000			19,136,250,000	
4.00.4.00.02.01.01.	Belanja Langsung				82,152,679,889			83,978,471,829.00	
4.00.4.00.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Anggota DPRA terhadap Layanan Sekretariat DPRA		100%	24,636,213,374		100%	27,279,954,123.85	
4.00.4.00.02.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	1 Tahun	31,650,000		1 Tahun	36,000,000.00	
4.00.4.00.02.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	1 Tahun	4,056,191,220		1 Tahun	4,265,415,000	
4.00.4.00.02.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	3 Kegiatan	175,400,000		3 Kegiatan	175,400,000	
4.00.4.00.02.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jangka Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	Banda Aceh	1 Tahun	299,850,119		1 Tahun	326,602,774	
4.00.4.00.02.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Banda Aceh	1 Tahun	576,784,179		1 Tahun	670,107,875	
4.00.4.00.02.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	1 Tahun	101,107,491		1 Tahun	114,654,888	
4.00.4.00.02.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banda Aceh	1 Tahun	361,556,000		1 Tahun	474,716,200	
4.00.4.00.02.01.01.016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik rumah tangga Pimpinan DPRA	Banda Aceh	1 Tahun	1,800,000,000		1 Tahun	1,800,000,000	
4.00.4.00.02.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jangka Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Banda Aceh	1 Tahun	1,183,700,000		1 Tahun	1,303,522,000	
4.00.4.00.02.01.01.018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan konsultasi dan rapat koordinasi ke luar daerah	Luar Provinsi Aceh	17 Orang	402,208,000		17 Orang	444,400,000	
4.00.4.00.02.01.01.020.	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	Banda Aceh	1 Tahun	1,812,250,000		1 Tahun	1,812,250,000	
4.00.4.00.02.01.01.022.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pembayaran Honorarium kegiatan dan jasa administrasi	Banda Aceh	1 Tahun	13,835,516,365		1 Tahun	15,856,885,386	
4.00.4.00.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	18,892,262,224		100%	9,680,770,500.00	
4.00.4.00.02.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terbangun	Banda Aceh	2 Unit	124,656,206		2 Unit	1,000,000,000	
4.00.4.00.02.01.02.004.	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan Pimpinan DPRA yang tersedia	Banda Aceh	4 Unit	3,315,000,000		-	-	
4.00.4.00.02.01.02.005.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Banda Aceh	1 Unit	465,000,000		2 Unit	1,200,000,000	
4.00.4.00.02.01.02.006.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas yang tersedia	Banda Aceh	1623 unit barang	8,837,391,235		40 Unit Barang	300,000,000	
4.00.4.00.02.01.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Banda Aceh	67 Unit Barang	821,102,604		90 Unit barang	2,000,000,000	
4.00.4.00.02.01.02.021.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas DPRA dan rumah jabatan Ketua DPRA yang terpelihara	Banda Aceh	82 Unit	1,268,270,000		82 Unit	1,290,370,000	
4.00.4.00.02.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	Banda Aceh	1 Unit	221,200,500		5 Unit	190,000,000	
4.00.4.00.02.01.02.023.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan Pimpinan DPRA yang terpelihara	Banda Aceh	4 Unit	244,780,250		4 Unit	270,800,000	
4.00.4.00.02.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Banda Aceh	74 Unit	2,337,329,975		75 Unit	2,384,680,000	
4.00.4.00.02.01.02.025.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas DPRA	Banda Aceh	1 Tahun	660,951,956		1 Tahun	596,970,000	
4.00.4.00.02.01.02.030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jangka Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Banda Aceh	1 Tahun	596,579,498		1 Tahun	447,950,500	
4.00.4.00.02.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran, Identitas dan Atribut		100%	1,518,000,000		100%	2,000,000,000.00	
4.00.4.00.02.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Emblem yang tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRA	Banda Aceh	405 stel, 10 Emblem	1,518,000,000		405 stel, 10 Emblem	2,000,000,000.00	
4.00.4.00.02.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi		100%	420,270,000		100%	1,402,242,000.00	
4.00.4.00.02.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Luar Provinsi Aceh	7 orang	110,260,000		30 Orang	480,000,000.00	
4.00.4.00.02.01.05.008.	Pengembangan SDM Aparatur	Jumlah PNS dan Non PNS Sekretariat DPRA yang mengikuti Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi Aceh	32 orang	310,010,000		95 Orang	922,242,000.00	
4.00.4.00.02.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%	78,261,122		100%	92,517,600.00	
4.00.4.00.02.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Banda Aceh	2 dok	6,446,922		2 dok	6,772,500	
4.00.4.00.02.01.06.005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja yang tersusun	Banda Aceh	8 dok	71,814,200		8 dok	85,745,100	
4.00.02.4.00.02.01.15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Qanun yang ditetapkan		100%	36,336,183,049		100%	43,198,987,605.15	
4.00.02.4.00.02.01.15.001.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Qanun Aceh yang ditetapkan	Dalam dan Luar Provinsi Aceh	8 Qanun	11,964,563,884		15 Qanun	20,712,372,000	
4.00.02.4.00.02.01.15.003.	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang terlaksana	Banda Aceh	357 Rapat	730,027,455		357 Rapat	802,708,500	
4.00.02.4.00.02.01.15.004.	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang terlaksana	Banda Aceh	20 Keg	754,100,464		20 Keg	796,240,500	
4.00.02.4.00.02.01.15.005.	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang Terlaksana	Dalam Provinsi Aceh	3 Kali	14,252,244,000		3 Kali	9,215,600,000	
4.00.02.4.00.02.01.15.006.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRA yang terlaksana	Dalam Provinsi Aceh	3 Keg	3,222,336,250		5 Keg	5,022,710,000	
4.00.02.4.00.02.01.15.007.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRA yang terfasilitasi	Luar Negeri, Luar Provinsi Aceh	3 Keg	5,015,461,996		5 Keg	6,186,640,553	
4.00.02.4.00.02.01.15.008.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Qanun yang terlaksana	Dalam Provinsi Aceh	3 Keg	397,449,000		3 Keg	462,716,052	
4.00.02.4.00.02.01.16.	Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA	Persentase Anggota DPRA yang dapat menjalankan fungsinya		100%	271,490,120		100%	324,000,000.00	
4.00.02.4.00.02.01.16.001.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRA yang mendapatkan pelayanan Medical CheckUp	Banda Aceh	81 Orang	271,490,120		81 Orang	324,000,000	